

**GREENPEACE**



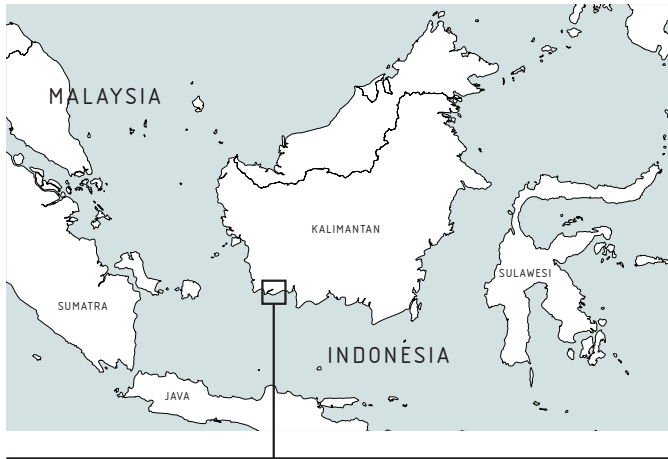
**MENGAPA PERUSAKAN IOI  
DI KETAPANG**

# **MASALAH MENDESAK**

**UNTUK RSPO  
DAN SEKTOR  
PERKEBUNAN**



# APAKAH LANSKAP KETAPANG?

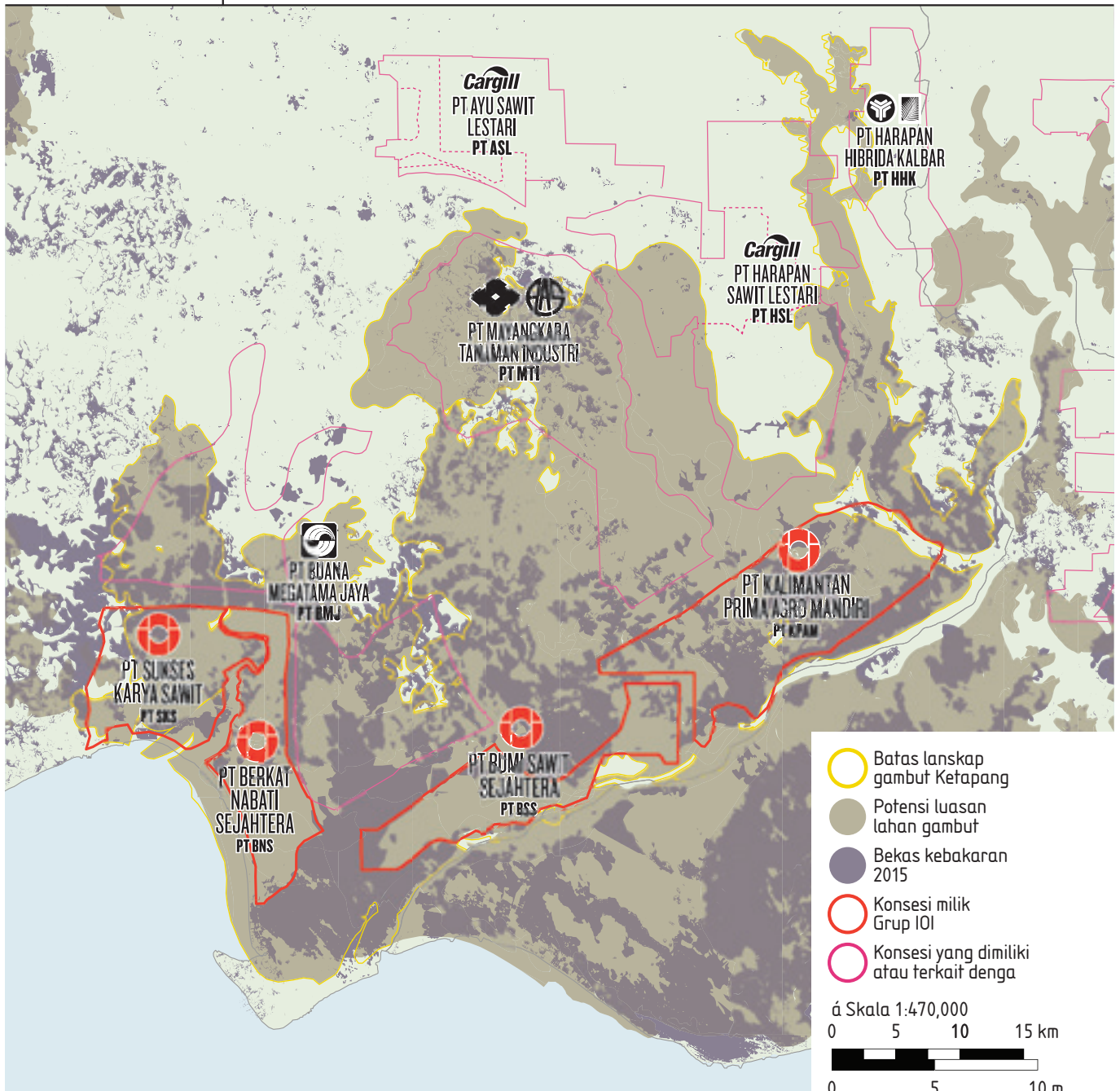


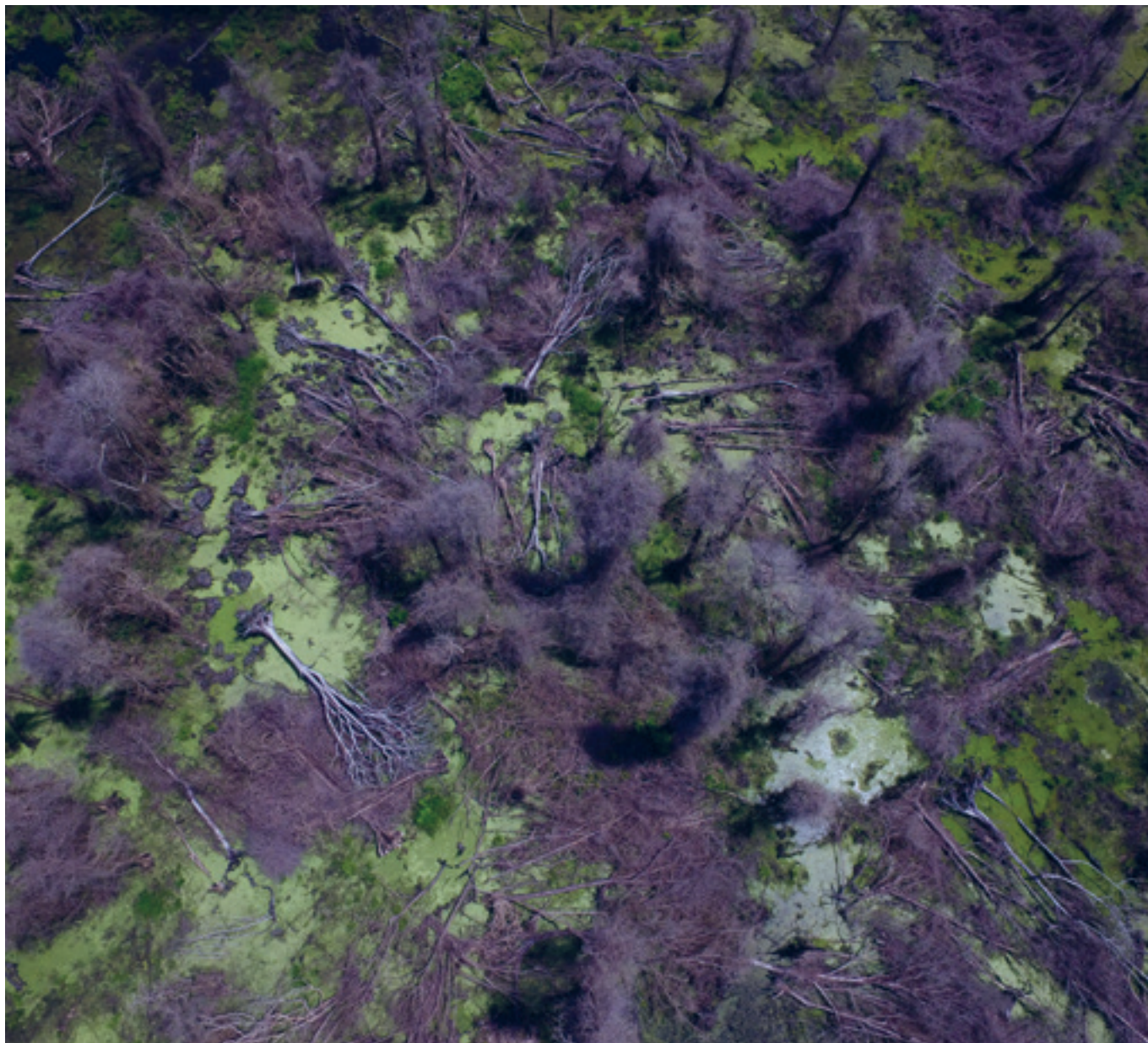
Untuk tujuan laporan ini, lanskap gambut Ketapang didefinisikan sebagai daerah gambut dengan bentang hampir utuh yang terletak di selatan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, seluas sekitar 214.000 hektar.

Indonesia saat ini masih kekurangan peta definitif daerah gambut. Tiga peta telah diproduksi sebelumnya, namun semuanya memiliki kekurangan.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia menyatakan secara jelas perlunya peta baru tapi tidak dijadwalkan muncul sampai November 2017.<sup>2</sup>

Tak satu pun dari peta yang ada meliputi sepenuhnya gambut di Indonesia dan beberapa daerah lahan gambut tidak muncul pada peta-peta ini, sehingga bahkan menggabungkan ketiga peta ini memberikan gambaran yang tidak lengkap. Peta gambut yang digunakan di sini adalah kombinasi dari peta gambut yang ada. Peta gabungan tersebut saat ini adalah metode terbaik untuk menunjukkan jangkauan minimum daerah yang perlu disurvei dengan benar saat menilai dampak dari industri berbasis drainase sebagai bagian dari pendekatan lanskap untuk pencegahan kebakaran dan konservasi lahan gambut.





## LATAR BELAKANG

Ketapang, Kalimantan Barat menjadi uji kasus komitmen perusahaan untuk produksi minyak sawit yang bertanggung jawab. Pernah menjadi tempat tinggal spesies yang terancam punah dan rentan termasuk orang utan, bekantan dan beruang madu,<sup>3</sup> lanskap gambut Ketapang sekarang sedang dirusak oleh sektor perkebunan dengan pembangunan kanal-kanal drainase; digunduli dan dikonversi menjadi perkebunan industri.<sup>4</sup> Hal ini berkontribusi pada merebaknya kebakaran besar dan rutin, yang membakar hampir sepertiga lanskap Ketapang pada tahun 2015.<sup>5</sup> Meningkatnya masalah banjir air laut juga akan cenderung lebih tinggi pada dekade mendatang seiring dengan gambut yang terbakar mulai menghilang dan gambut yang dikeringkan terdegradasi dan turun, menyebabkan permukaan tanah perlahan-lahan tenggelam menuju permukaan laut.<sup>6</sup>

Beberapa perusahaan perkebunan dalam lanskap ini berkaitan erat dengan pemain di sektor pulp<sup>7</sup> yang telah membuat komitmen tegas untuk konservasi. Perusahaan lain

dikuasai langsung oleh kelompok minyak kelapa sawit besar yang tergabung dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). IOI, misalnya, menguasai hampir sepertiga luas lahan dalam konsesi<sup>8</sup> di lanskap gambut Ketapang.<sup>9</sup>

Sementara tidak ada operasi pulp dalam lanskap Ketapang yang menunjukkan tanda-tanda pembangunan industri, IOI dan perusahaan kelapa sawit lain yang telah mengembangkan konsesi mereka telah memberi kontribusi pada buruknya keadaan daerah yang rusak berat ini. Namun demikian, masih banyak yang harus diperjuangkan. Melindungi dan memulihkan lahan gambut dan hutan yang masih hidup di Ketapang tidak hanya akan mengurangi risiko kebakaran, tetapi akan sangat menguntungkan konservasi, keanekaragaman hayati dan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat. Namun, tanpa tindakan segera dari IOI dan pemangku kepentingan lainnya dalam lanskap ini, apa yang tersisa dari Ketapang berisiko akan hangus sia-sia.

**PT BSS, 16 April 2016,  
2°55'55.686 "S 110°44'41.496" E**

Gambar drone mengungkap dampak kebakaran berulang di hutan dekat konsesi kelapa sawit PT Bumi Sawit Sejahtera (IOI).

© Greenpeace



**IOI GROUP**

**PERUSAHAAN: IOI GROUP (IOI CORPORATION BERHAD)<sup>10</sup>**

**KANTOR PUSAT: MALAYSIA**

**TERDAFTAR DI PASAR SAHAM:  
MALAYSIAN STOCK EXCHANGE<sup>11</sup>**

**ANGGOTA RSPO: YA**

**JOINT VENTURES: IOI MEMILIKI MAYORITAS SAHAM**

(67%) dalam 4 perusahaan perkebunan Indonesia (PT Bumi Sawit Sejahtera, PT Berkat Nabati Sejahtera, PT Sukses Karya Sawit, PT Ketapang Sawit Lestari)<sup>12</sup> yang dimiliki bersama dengan Bumitama Agri Ltd,<sup>13</sup> dengan saham 28%. IOI juga memiliki sebagian Bumitama Agri Ltd (31.4%),<sup>14</sup> yang listed di Bursa Saham Singapura. Selain memiliki perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas, perusahaan ini juga menguasai PT Kalimantan Prima Agro Mandiri.<sup>15</sup>

**KAITAN GRUP DENGAN PASAR GLOBAL: YA**

termasuk sefmen penyulingan dan manufaktur IOI Loders Crokiaan<sup>16</sup> dan IOI Oleochemicals yang menjual ke lebih dari 65 negara,<sup>17</sup> termasuk AS, Belanda dan Cina.

**LOKASI KONSESI DI INDONESIA:  
KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT<sup>18</sup>**



# IOI GROUP DI KETAPANG



PT BSS, 16 April 2016, 2°55'13.1"S 110°43'46.9"E

Sebuah tegakan kelapa sawit muda di tengah sisa-sisa pohon hangus di konsesi kelapa sawit PT Bumi Sawit Sejahtera (IOI). Lokasi yang menderita kebakaran meluas pada tahun 2015, langsung ditanami. Analisis Landsat menunjukkan bahwa daerah yang berbatasan dengan wilayah yang diidentifikasi sebagai 'wilayah terlarang' dalam lahan gambut, dibuka setelah pertengahan 2014.

© Ifansasti/Greenpeace

Greenpeace pertama mengangkat masalah perkebunan IOI di Kalimantan pada tahun 2008, menyoroti deforestasi dan drainase gambut dan pembersihan hutan habitat orangutan.<sup>19</sup>

Investigasi Greenpeace dan lainnya berlanjut, lalu 11 LSM mengajukan keluhan kepada RSPO pada tahun 2010, yang meliputi masalah dalam konsesi Ketapang IOI termasuk izin lahan gambut sejak 2009, pembukaan hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCV) dan perambahan ilegal ke hutan produksi di luar batas konsesi PT Berkas Nabati Sejahtera (PT BNS). Keluhan ini juga termasuk pelanggaran hak tanah masyarakat dalam konsesi Pelita IOI di Sarawak, Malaysia. Panel keluhan RSPO menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan bagian dari keluhan ini berkaitan dengan Ketapang,<sup>20</sup> sementara sengketa tanah Pelita/Long Teran Kanan masih dalam proses penyelesaian konflik.<sup>21</sup>

Pada bulan Maret 2015 konsultan nirlaba Aidenvironment membuat keluhan baru kepada RSPO, menuduh IOI melanggar standar RSPO dan kebijakan lingkungan mereka sendiri dalam konsesi mereka di Ketapang<sup>22</sup>. Termasuk bukti spesifik:

- **pembangunan saluran drainase melalui daerah hutan HCV**
- **pembukaan kawasan hutan di lahan gambut dalam, berlanjut setelah perusahaan diberitahu mengenai pelanggaran standar ini**
- **penanaman ilegal di luar batas-batas PT BNS.**

Menanggapi keluhan ini, pada tanggal 14 Maret 2016, Panel Keluhan RSPO memutuskan untuk menskors IOI Group karena pelanggaran prinsip-prinsip RSPO,<sup>23</sup> dengan menangguhkan sertifikasi mereka untuk semua operasi internasional perusahaan.<sup>24</sup> Penangguhan tersebut dengan cepat memutuskan pelanggan utama IOI, seperti Unilever, Nestle, Mars, Kellogg<sup>25</sup> dan baru-baru ini General Mills mengumumkan akan pindah ke pemasok lain.<sup>26</sup> IOI lalu merespon dengan menggugat RSPO<sup>27</sup> (dan akhirnya membatalkan gugatan tersebut)<sup>28</sup> dan menggandeng Global Environment Centre (GEC), LSM yang berbasis di Malaysia, untuk

merekomendasikan tindakan untuk menunjukkan bahwa IOI mematuhi Prinsip dan Kriteria RSPO, terutama dalam kaitannya dengan masalah lahan gambut, HCV dan pengelolaan kebakaran.

Dampak dari IOI di Ketapang jauh lebih besar daripada yang diakui dalam rincian keluhan RSPO. Drainase gambut akan berkontribusi terhadap degradasi, penurunan dan peningkatan risiko kebakaran jauh melampaui batas-batas konsesi, dan kerusakan hutan yang tersisa dan keanekaragaman hayati. Degradasi gambut dan kebakaran merupakan kontributor utama emisi karbon dioksida di Indonesia.

IOI sekarang dalam proses memproduksi kebijakan keberlanjutan yang baru, tetapi hal ini tidak akan berarti tanpa tindakan yang komprehensif di lapangan, dan IOI memiliki catatan pelanggaran kebijakan keberlanjutan (lihat di bawah). Tindakan yang ditawarkan sejauh ini tidak mengatasi kerusakan IOI, atau melindungi hutan dan lahan gambut yang tersisa atau mengurangi risiko kebakaran. RSPO berisiko memberi stempel rencana pengelolaan gambut yang tidak mengatasi berlanjutnya degradasi lahan gambut, kebakaran dan emisi dalam skala besar, dan dapat merusak lanskap gambut Ketapang tanpa dapat diperbaiki lagi.

Presiden Joko Widodo memberikan sinyal yang jelas tentang arah Indonesia dan sektor perkebunan untuk maju ke depan ketika ia menyerukan diakhirinya pembangunan lahan gambut baru,<sup>29</sup> memblokir kanal utama, merestorasi kawasan yang terbakar dan larangan pengembangan perkebunan kelapa sawit lebih lanjut pada lahan hutan.<sup>30</sup>

Walaupun beberapa perusahaan perkebunan telah mulai membuat peta dasar,<sup>31</sup> dan membendung ratusan kanal di sekitar perkebunan mereka,<sup>32</sup> dibutuhkan jauh lebih banyak tindakan. IOI, sebagian besar perusahaan RSPO dan sebagian besar perusahaan perkebunan sejauh ini tidak melakukan apa-apa untuk menunjukkan keseriusan mereka untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa kebakaran dan emisi yang mencekik Indonesia dan wilayah lain pada tahun 2015 tidak terulang.



**IOI GROUP**

# PT BSS: MENDOKUMENTASIKAN WARISAN KERUSAKAN DARI IOI



**PT BSS, 16 April 2016, 2°55'25.1"S 110°43'45.2"E**

Sebuah anakan kelapa sawit di tengah sisa-sisa pohon yang hangus di konsesi kelapa sawit PT Bumi Sawit Sejahtera (IOI). Lokasi yang mengalami kebakaran hebat pada tahun 2015, yang kemudian ditanami. Analisis Lansat menunjukkan bahwa daerah yang berbatasan dengan kawasan yang diidentifikasi perusahaan sebagai 'wilayah terlarang' lahan gambut, sudah dibuka setelah pertengahan 2014.

© Ifansasti/Greenpeace



**PT BSS, 16 April 2016, 2°55'13.1"S 110°43'46.9"E**

Sebuah anakan kelapa sawit di tengah sisa-sisa pohon yang hangus di konsesi kelapa sawit PT Bumi Sawit Sejahtera (IOI). Lokasi ini mengalami kebakaran hebat pada tahun 2015, lalu ditanami. Analisis Lansat menunjukkan bahwa daerah ini, yang membatasi wilayah gambut yang diidentifikasi perusahaan sebagai wilayah 'terlarang' untuk pembangunan, dibuka setelah pertengahan 2014.

© Ifansasti/Greenpeace



**PT BSS, 16 April 2016, 2°55'28.9"S 110°43'44.7"E**

Gambar drone menunjukkan pengembangan perkebunan di wilayah yang mengalami kebakaran hebat pada tahun 2015. Analisis Lansat menunjukkan bahwa daerah ini dibuka setelah pertengahan 2014.

© Ifansasti/Greenpeace



**PT BSS, 17 April 2016,**  
**2°47'57.5 "S 110°54'36.2"E**

Seorang investigator Greenpeace mencatat posisi GPS di samping kanal yang membelah lahan gambut yang diidentifikasi sebagai hutan dengan Stok Karbon Tinggi.  
©Ifansasti/Greenpeace



**PT BSS, 17 April 2016,**  
**2°47'57.684 "S 110°55'41.76" E**

Gambar drone menunjukkan hamparan hutan yang terbakar antara konsesi kelapa sawit IOI PT Bumi Sawit Sejahtera dan PT Kalimantan Prima Agro Mandiri. Wilayah dalam PT BSS ini diidentifikasi sebagai hutan gambut Bernilai Konservasi Tinggi termasuk habitat orangutan, beruang madu dan satwa liar lainnya.  
© Greenpeace

Wilayah yang diidentifikasi 'terlarang' untuk pengembangan

Batas konsesi PT BSS



**PT BSS, 17 April 2016,**  
**2°48'5.34 "S**  
**110°55'34,548"E**

Gambar drone mendokumentasikan sebuah kanal pengeringan utama yang memotong wilayah perusahaan yang diidentifikasi sebagai wilayah 'terlarang' hutan penyangga.  
©Greenpeace



**PT BSS, 16 April 2016,**  
**2°51'22.9"S 110°52'33.0"E**

Anakan pohon sawit yang baru ditanam di samping saluran pengeringan yang membelah wilayah yang diidentifikasi bernilai konservasi tinggi (NKT). Wilayah yang dikeringkan merupakan wilayah penyangga penting bagi danau Gelinggang serta habitat satwa liar termasuk Orangutan dan Beruang Madu.  
©Ifansasti/Greenpeace

---

## 2009

Pernyataan Kebijakan Tanggungjawab Perusahaan IOI 2009: 'Kami menghindari secara ketat perambahan hutan atau lahan gambut dan/atau pengembangan perkebunan baru yang mengakibatkan deforestasi.'<sup>33</sup>

---

## 2010

Survei HCV PT Bumi Sawit Sejahtera (BSS): Menurut laporan HCV perusahaan,<sup>34</sup> lebih dari 90% dari area konsesi ditutupi oleh hutan rawa ketika disurvei pada tahun 2010, meskipun sebagian besar terdegradasi. Laporan tersebut menyatakan bahwa hutan ini merupakan tempat tinggal spesies yang terancam punah termasuk orang utan, bekantan dan siamang pegunungan Müller, Kalimantan.<sup>35</sup> Laporan ini mengidentifikasi sekitar 711ha gambut lebih dari 3 meter.<sup>36</sup> Wilayah seperti ini secara hukum dilindungi dan tidak boleh dikembangkan menurut hukum Indonesia, meskipun penegakannya lemah.<sup>37</sup> Peta penanaman direncanakan dan kawasan lindung yang muncul dalam laporan HCV<sup>38</sup> menunjukkan kawasan lindung secara signifikan lebih kecil dari yang ditunjukkan oleh peta konsolidasi gambut dan HCV dan daerah HCS diproduksi sebagai bagian dari proses survei selanjutnya,<sup>39</sup> terutama mengabaikan banyak daerah gambut, termasuk daerah yang diidentifikasi sebagai gambut dalam.

---

## JANUARI 6 2014

'Sustainable Palm Oil Manifesto' Manifesto Kelapa Sawit Berkelanjutan (SPOM) ditandatangani oleh CEO IOI, termasuk:

- Perlindungan lahan gambut terlepas dari kedalaman untuk pengembangan baru.
- Tidak ada deforestasi dalam konservasi hutan tinggi stok karbon (HCS)<sup>40</sup>

---

## JANUARI 30 2014

Manajer regional senior lingkungan, kesehatan dan keselamatan IOI menandatangani rencana restorasi lahan gambut untuk 141 hektar lahan gambut dalam yang sudah dibuka di PT BSS.<sup>41</sup>

---

## JULI 2014

Greenpeace menerima jaminan lisan dari CEO IOI Dato Lee dalam sebuah pertemuan bahwa komitmen untuk menghentikan semua izin lahan gambut dan hutan yang diberlakukan terhadap BSS dan bahwa pengembangan akan berhenti sementara perusahaan mempelajari pemetaan lahan gambut/vegetasi/karbon.

---

## AGUSTUS 2014

Sebuah surat dari Dato Lee menegaskan pemahaman Greenpeace dari perjanjian pertemuan Juni: bahwa 'komitmen kami untuk menghentikan pembukaan lahan gambut dan wilayah dengan potensi HCS dalam semua konsesi aktif kami' dan 'PT BSS adalah konsesi satu-satunya di mana IOI saat ini sedang membuka lahan'.<sup>43</sup>

---

## 2013/PADA JAN 2014

Pembangunan signifikan telah dimulai dalam konsesi PT BSS. Pada 26 Januari 2013, di wilayah timur laut dari PT BSS terdapat jaringan jalan dan kanal yang hampir penuh terbangun, dengan blok-blok perkebunan sebagian besar terbuka. Di bagian barat daya konsesi, jalan dan kanal-kanal telah terbangun di sebagian besar wilayah dan sekitar 7 blok perkebunan (+/- 175ha) telah dibuka.

---

## FEBRUARI 27 2014

IOI menyerahkan dokumen kepada RSPO sejalan dengan Prosedur Penanaman Baru untuk PT BSS.<sup>42</sup> Setiap pembangunan sebelum dokumen ini diterima adalah pelanggaran protokol RSPO.

Sebagian besar PT BSS memiliki kanal dan jalan akses, jauh sebelum rencana kerja yang ditunjukkan dalam NPP.

Citra satelit SkyBox menunjukkan pengembangan lebih lanjut/ kanal di daerah barat PT BSS. Pada 30 Agustus, konsesi ini memiliki jaringan jalan dan kanal yang terbangun penuh; jaringan ini termasuk wilayah yang diidentifikasi pada peta yang diberikan kepada Greenpeace sebagai wilayah 'tak tersentuh'. Jaringan ini termasuk wilayah gambut dalam bagian barat daya konsesi yang belum dikembangkan sebagai perkebunan.



---

## NOVEMBER 2014

Anak perusahaan IOI Loders Croklaan mempublikasikan kebijakan yaitu komitmen terhadap deforestasi nol pada wilayah HCS sebagaimana didefinisikan dalam Pendekatan HCS.<sup>44</sup>

---

## 15 DESEMBER 2014

IOI menandatangani kebijakan komitmen keberlanjutan terhadap 'tidak ada deforestasi dalam wilayah HCV dan HCS' dan untuk 'melindungi lahan gambut berapapun kedalamannya dalam pengembangan baru'.<sup>45</sup>

---

## 12 JANUARI 2015

IOI Corporation dan IOI Loders Croklaan menandatangani pernyataan bersama untuk mematuhi kebijakan keberlanjutan masing-masing.<sup>50</sup>

---

## NOVEMBER 2015

Greenpeace menginformasikan perusahaan akan temuannya yang berkaitan dengan PT BSS. Perusahaan tidak memberikan komentar substansial terhadap laporan Greenpeace, selain mengklaim telah memulihkan daerah gambut yang dibuka dengan 'tidak sengaja'.

---

---

## 2 JUNI 2016

IOI Group mempublikasikan 'Pembaruan keberlanjutan': seperti biasa, IOI Group ingin menegaskan kembali bahwa kami tetap berdedikasi untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan (baik korektif dan memandang ke depan) untuk menunjukkan komitmen kami untuk membangun bisnis kelapa sawit kelas dunia, berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diterbitkan dengan **tanpa deforestasi, tanpa penanaman di lahan gambut, tanpa pembakaran pada semua penanaman baru dan penanaman kembali kelapa sawit, dan untuk mendorong dampak sosial-ekonomi yang positif bagi penduduk dan masyarakat.**<sup>56</sup>

---

## 2014/2015

Kebakaran meluas<sup>46</sup> membakar banyak wilayah konsesi PT BSS, termasuk daerah yang dialokasikan untuk perlindungan oleh penilaian HCV/HCS perusahaan.

Laporan Mei 2015 yang dikomisikan oleh IOI disusun oleh konsultan Aksenta menemukan separuh wilayah konsesi terbakar pada 2014 saja,<sup>47</sup> termasuk 141 hektar 'wilayah restorasi'.<sup>48</sup> Analisis Landsat dan data FHS untuk 2015 menunjukkan kebakaran besar dalam wilayah penting yang terbakar selama dua tahun berturut-turut, dengan hampir 1.700 hektar dalam PT BSS, termasuk sebagian besar dari 141 hektar dari 'wilayah restorasi'.<sup>49</sup>

---

## OKTOBER 2015

Pemerintah Indonesia memberi sanksi PT BSS di bawah UULH 2009 karena gagal mencegah kebakaran.<sup>51</sup>

---

## 5 NOVEMBER 2015

Instruksi Menteri LHK melarang, antara lain, penanaman baru di daerah yang terbakar dan mengharuskan perusahaan untuk membuat sekat kanal.<sup>52</sup>

---

## APRIL 2016

Investigasi lapangan dan analisis satelit oleh Greenpeace mendokumentasikan:

- penanaman baru di kawasan yang terbakar<sup>53</sup>
- Drainase pasca Januari 2014 dan/atau penanaman di lahan gambut
- Kanal drainase di daerah terlarang yang diidentifikasi oleh peta konsolidasi gambut, HCV dan HCS (dengan definisi pendekatan IOI sendiri) disiapkan oleh konsultan lingkungan Aksenta<sup>54</sup>

Kegagalan membuat ekat-sekat kanal dan mengambil tindakan lain sesuai dengan instruksi menteri bulan November 2015.

---

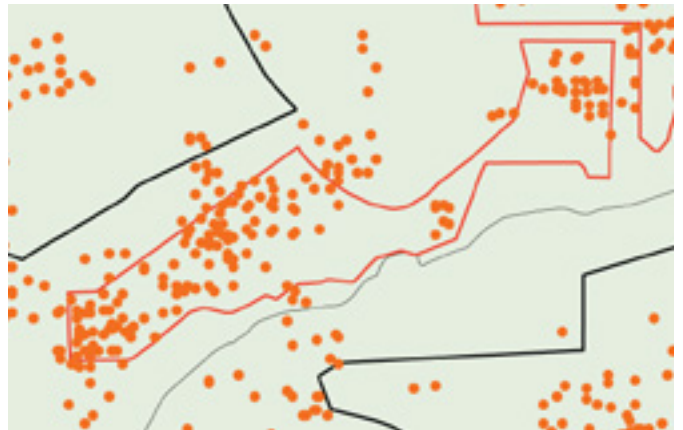
## APRIL-MEI 2016

Peer review dari laporan HCV untuk PT BSS, PT BNS dan PT SKS 2016 dilakukan setelah penangguhan IOI ini dari RSPO, semua menemukan masalah yang dikategorikan pengulas sebagai 'besar' terhadap sebagian besar aspek laporan asli. Dalam referensi untuk PT BSS, kritik termasuk kurangnya pertimbangan HCV dalam lanskap yang lebih luas, buruknya kualitas peta yang disajikan, kurangnya pemantauan rencana dan tidak mengidentifikasi kegiatan operasional perusahaan sebagai ancaman bagi HCV 1 (keanekaragaman hayati).<sup>55</sup>

---

# PT BUMI SAWIT SEJAHTERA: HOTSPOT KEBAKARAN

2014



**PT BSS 22 Februari 2014,**  
**2°48'55.92"S 110°48'21.24"E**  
Api membakar gambut di samping kanal  
yang menembus hingga ke luar batas  
konsesi PT BSS.  
©Aidenvironment

2015



**PT BNS, 3 Desember 2015,  
2°53'46.23" S 110°40'9.33" E**

Kebakaran dan kabut asap di hutan antara dua konsesi kelapa sawit IOI - PT Berkat Nabati Sejahtera dan PT Bumi Sawit Sejahtera - di Bentang Alam Gambut Ketapang.

©Ifansasti/Greenpeace

# PT BSS: BUKTI CITRA SATELIT MENUNJUKKAN DEFORESTASI, DRAINASE, PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN BEKAS KEBAKARAN

LANSAT 7:  
24.06.13



LANSAT 7:  
26.01.14



LANSAT 7: 27.06.14



LANSAT 7: 22.02.15



LANSAT 7:  
05.11.15



LANSAT 7:  
15.05.16



# STUDI KASUS KERUSAKAN: PEMBUKAAN DAN PENANAMAN DI LAHAN GAMBUT DI SUDUT TIMUR LAUT PT BSS



PT BSS, 17 April 2016,  
2°48'22.974"S 110°55'24.966"E

Gambar drone mendokumentasikan hutan yang telah terbakar dan kanal drainase yang memotong lahan gambut menuju wilayah yang diidentifikasi Berilai Konservasi Tinggi di konsesi kelapa sawit PT Bumi Sawit Sejahtera (IOI).

©Greenpeace

Gambut lebih dari tiga meter dilindungi oleh hukum Indonesia.<sup>57</sup> Prinsip RSPO termasuk 'Kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang terkait',<sup>58</sup> dan kriteria penanaman untuk perusahaan baru diarahkan untuk menghindari 'penanaman berlebihan pada ... tanah rentan, termasuk gambut' dalam pembangunan baru.<sup>59</sup> Namun demikian, IOI membuka daerah penting yang diidentifikasi sebagai gambut dalam di dalam konsesi PT BSS. Meskipun demikian, laporan yang dikomisikan oleh IOI kepada konsultan Aksenta mengklaim pada Mei 2015 bahwa kawasan gambut dalam telah dibuka karena 'degradasi parah telah menurunkan nilai konservasinya'; laporan tersebut juga mengonfirmasi pembukaan lahan gambut penting setelah IOI menyatakan komitmennya untuk menghentikan pembukaan lahan gambut pada 6 Januari 2014.<sup>60</sup>

*'Menurut laporan kemajuan pembukaan lahan dan peta stacking yang diberikan oleh unit manajemen, unit manajemen telah melakukan pembukaan lahan pada wilayah lahan gambut dalam di bagian utara dari Wilayah Izin, dalam periode Januari-Februari 2014 (lihat peta pada halaman 22). [...] Kegiatan pembukaan lahan dihentikan segera pada tanggal 14 Februari.'*

Gambar tertanggal 18 Desember 2013 - kurang dari tiga minggu sebelum komitmen IOI pada tanggal 6 Januari 2014 untuk menghindari semua pengembangan lahan gambut apapun kedalamannya - menunjukkan saluran drainase (garis lurus) di banyak daerah, dengan lahan yang dibuka dan disiapkan untuk ditanami di bagian barat daya dan vegetasi kasar jelas di daerah lain. Yang tersisa kemudian dikenali sebagai mempunyai Stok Karbon tinggi, oleh metodologi yang dipilih perusahaan.

Pada 26 Januari 2014, citra Landsat 7 menunjukkan bahwa semua wilayah lahan gambut 141ha tersebut telah

sepenuhnya dikembangkan dan sebagian besar dibersihkan. Selain itu, terdapat jalan dan kanal di sebelah utara wilayah ini, dan juga memotong gambut dalam.

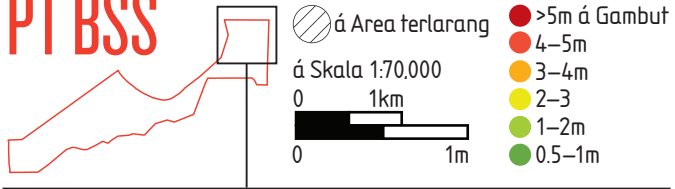
Pada tanggal 30 Januari 2014, Manajer senior IOI untuk lingkungan, kesehatan dan keselamatan menandatangani rencana restorasi lahan gambut untuk 141 hektar lahan gambut dalam yang sudah dibuka di PT BSS.<sup>61</sup>

Pada tanggal 3-4 Februari 2014, penilai SAI Global melakukan audit verifikasi NPP untuk IOI mengunjungi konsesi. Dokumen NPP melaporkan: 'selama pengamatan lapangan kami menemukan bahwa daerah gambut lebih dari kedalaman 3 meter di luar HCV diidentifikasi telah dibuka di Blok O5a (110°54,33' BT & 2°48,95' LS) dan blok P5A (110°54,77' BT & 2°48,96' LS) - lihat lampiran 3. Pembukaan lahan gambut dalam di area penanaman baru ditemukan tidak sesuai dengan rencana pengembangan dan pengelolaan PT BSS dan prinsip dan kriteria RSPO terutama kriteria 7.3 indikator utama 1 dan kriteria 7.4 indikator minor 2. SAI Global mencatat bahwa PT. BSS telah membentuk program restorasi dimulai pada tahun 2014 sampai dengan 2016 (Lampiran 4).'<sup>62</sup>

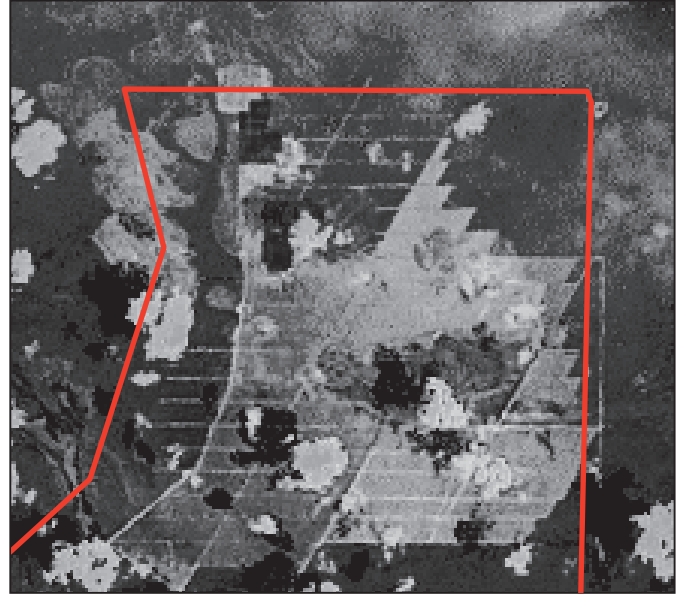
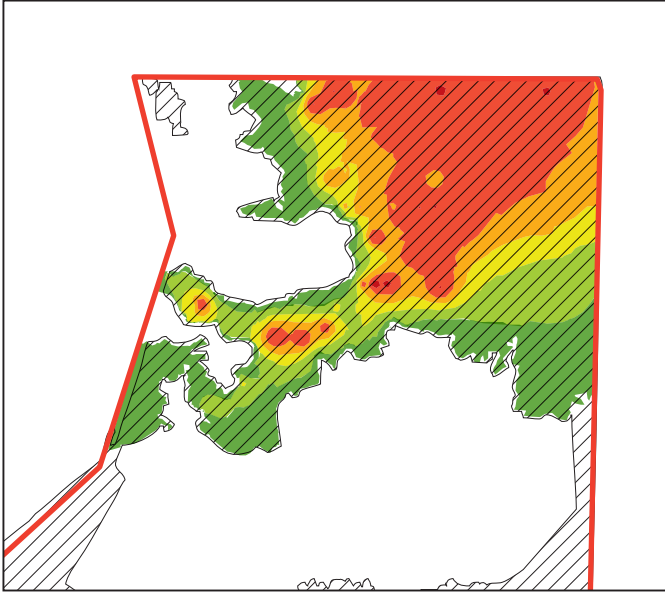
Pada 11 Februari citra Landsat 7 menunjukkan setidaknya satu jalan dan kanal tambahan, memotong gambut dalam dan menghubungkan ke area HCV (yang disebut HCV 7 area) ke penampungan air di wilayah pembibitan.

Pada bulan Oktober 2014, banyak daerah restorasi 141ha telah terbakar.<sup>63</sup> Sebuah citra satelit resolusi tinggi tanggal 19 Desember 2015 menunjukkan bahwa kanal drainase terus menutupi seluruh area dimaksudkan untuk restorasi, dan pengurangan vegetasi menunjukkan sedikit kegiatan restorasi yang serius. Tanaman muda sekarang terlihat (garis paralel sempit hijau) di bagian barat daya daerah restorasi.<sup>64</sup> Hal ini juga terlihat pada area lahan gambut di timur wilayah restorasi, juga pada gambut.

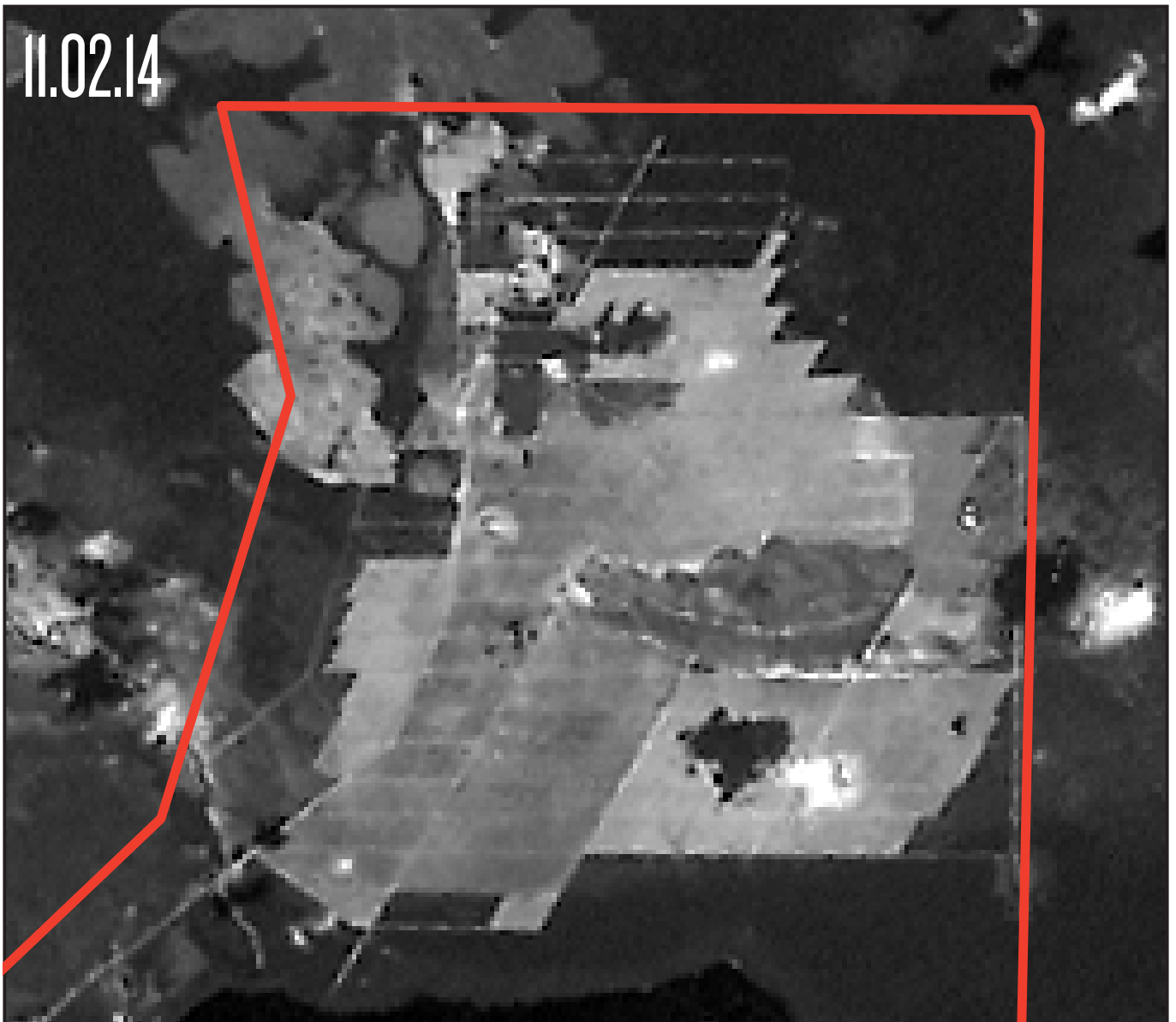
**PT BSS**



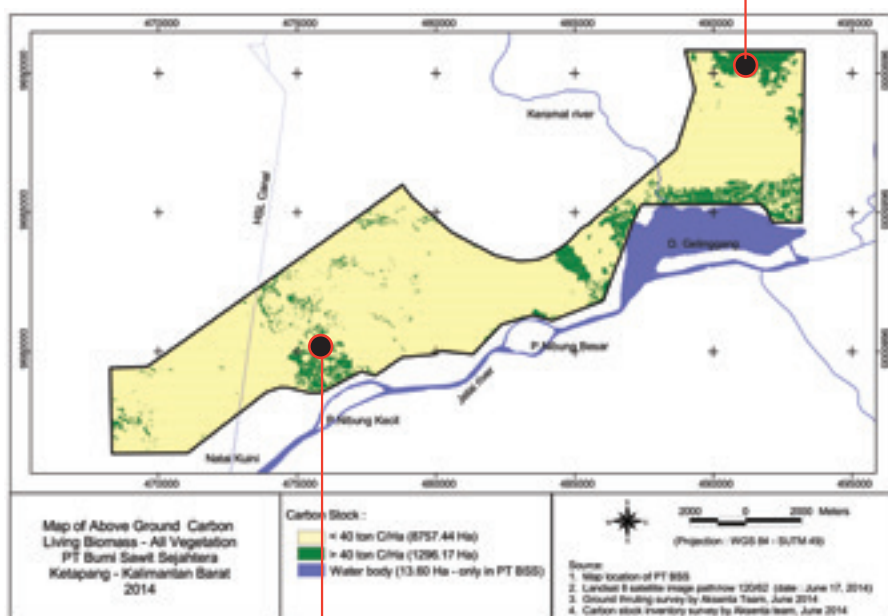
**26.01.14**



**11.02.14**



# WARISAN KERUSAKAN HUTAN DARI IOI DI PT BSS



**PT BSS, 7 Maret 2014, 2°50'38"S 110°54'40"E**  
Kanal drainase memotong menuju ke hutan yang diidentifikasi sebagai daerah 'terlarang' dengan Nilai Konservasi Tinggi.  
©Rante/Greenpeace



**PT BSS, 20 Februari 2015**  
Pembukaan hutan yang diidentifikasi bernilai stok karbon tinggi (HCS).  
©Aidenvironment



# IOI TERUS BICARA TANPA AKSI



## IOI GROUP

Pada tanggal 27 Mei, IOI mengedarkan rancangan kebijakan baru dan rencana aksi untuk konsultasi.<sup>65</sup> Hal ini tidak lebih dari kebijakan IOI yang sudah ada, dan bahkan muncul untuk menurunkan komitmen sebelumnya.<sup>66</sup> Greenpeace memberitahu perusahaan bahwa proposal tersebut masih lemah, tanpa jadwal yang kredibel untuk implementasi atau tonggak terukur. Rancangan kebijakan tersebut tidak memiliki komitmen yang signifikan sebagai berikut:

- **Moratorium ekspansi, termasuk di konsesi yang ada:** Meskipun kebijakan IOI ini berkomitmen untuk tidak ada deforestasi dan pembukaan hutan HCV, tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa semua hutan yang tersisa dan daerah lain yang secara sosial atau ekologis penting dalam lanskap yang lebih luas diidentifikasi dan dilindungi. Perusahaan harus berkomitmen untuk secepatnya melakukan moratorium pembangunan, termasuk dalam konsesi yang ada, sementara kajian yang tepat dilakukan.
- **Pendekatan lanskap untuk konservasi lahan gambut:** IOI harus membuat kebijakan yang secara eksplisit memasukkan komitmen untuk melestarikan lanskap hutan dan lahan gambut yang terdampak pasokan IOI. Hal ini dimulai dengan pemetaan hidrologi dari lanskap menggunakan teknologi tepat guna (termasuk LiDAR) untuk memahami dampak deforestasi dan drainase. Data dasar ini akan mengintegrasikan rencana rencana pengelolaan untuk mengurangi risiko kebakaran dan melindungi semua hutan yang tersisa dan lahan gambut di lanskap ini.
- **Jadwal dan indikator terukur:** kebijakan ini kekurangan tujuan yang terukur, dan tidak memiliki tonggak dan jadwal untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, tidak jelas ketika perusahaan berencana untuk memastikan bahwa IOI Group sepenuhnya sesuai dengan kebijakannya sendiri.
- **Drainase dan kerusakan masa lalu:** Rencana aksi ini tidak menentukan untuk mengakhiri drainase yang berdampak terhadap gambut, di luar atau di dalam konsesi IOI lainnya di daerah tersebut, juga tidak menentukan langkah-langkah untuk melindungi atau memulihkan vegetasi alami untuk semua

daerah gambut. Tidak disebutkan mengenai kerusakan HCS lain dan daerah HCV atau bagaimana ini akan direhabilitasi.

- **Standar yang tidak memadai untuk perlindungan hutan dan gambut:** Grup IOI mendukung sebuah kajian stok karbon tinggi yang didanai oleh penandatanganan manifesto Kelapa Sawit Berkelanjutan,<sup>67</sup> yang memperbolehkan pembukaan hutan sampai dengan 75 ton karbon per hektar: mengingat kajian HCS ini tidak bertujuan untuk merepresentasikan penerapan cukup dari komitmen perusahaan. Sebagai gantinya dikembangkan 'Pendekatan Stok Karbon Tinggi' ini diawasi oleh kelompok perusahaan perkebunan dan LSM didasari oleh kelas vegetasi dan melindungi potongan-potongan 'hutan regenerasi muda',<sup>68</sup> hutan HCS yang secara umum terdapat kurang dari 75 ton karbon per hektar. Kebijakan ini juga mengutip Prinsip dan Kriteria RSPO (P&C) dan 'Manual Praktik Manajemen Terbaik untuk budidaya kelapa sawit di lahan gambut' sebagai panduan pada perkebunan yang sudah ada; hal ini tidak cukup dan jauh dari apa yang dilakukan oleh pemain lain di sektor perkebunan. Rencana aksi perusahaan berkomitmen pada standar RSPO Next,<sup>69</sup> namun tidak memberikan perlindungan tambahan untuk lahan gambut pada penanaman yang ada dan tidak memberikan definisi hutan dengan stok karbon tinggi.<sup>70</sup>
- **Transparansi dan akuntabilitas:** kebijakan menghilangkan komitmen terukur untuk transparansi. IOI seharusnya mempublikasikan semua peta konsesi untuk operasi sendiri melalui pemantauan hutan dan sistem peringatan online Global Forest Watch dan meminta semua pemasoknya untuk melakukan hal yang sama.
- **Masyarakat ditawarkan peluang yang adil dan merata:** kebijakan harus mencakup komitmen yang jelas untuk melakukan penilaian independen kondisi sosial dan tenaga kerja di konsesi kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia dan menyelesaikan keluhan yang belum terselesaikan termasuk dengan masyarakat adat Long Teran Kanan secara transparan untuk kepuasan masyarakat lokal.

# PEMASOK MINYAK SAWIT PIHAK KETIGA



**PT Arrtu Energi Resources, 20 September 2015,  
1°37'20.1"S 110°3'29.671"E**

Seorang investigator Greenpeace mencatat koordinat GPS di batas konsesi PT Arrtu Energi Resources (Elang High) di Ketapang, Kalimantan Barat.

©lfansasti/Greenpeace

Perusahaan-perusahaan, termasuk Eagle High, memasok minyak sawit ke anggota RSPO besar seperti Cargill dan Wilmar, yang kemudian berdagang dengan anak perusahaan IOI dan merek global. Investigasi terbaru Greenpeace mengungkap terjadinya kebakaran hebat dan pembukaan lahan gambut di dalam dan di luar batas-batas konsesi PT Arrtu Energi Resources (Eagle High) di Ketapang, Kalimantan Barat. Wilayah ini diidentifikasi sebagai habitat Orangutan dan termasuk dalam wilayah moratorium pemerintah untuk izin baru pembangunan di hutan primer dan lahan gambut. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana masalah di Ketapang melampaui Grup IOI.

Jaringan pemasok eksternal dan perdagangan yang kompleks menjadi penting bagi industri kelapa sawit secara keseluruhan untuk membersihkan operasi mereka dan memantau produsen berskala lebih kecil, sebagai bagian dari pemecahan masalah kebakaran dan kerusakan lahan gambut.



**PT Arrtu Energi Resources, 20 September 2015,**  
Gambar Drone di batas konsesi Arrtu Energi Resources (Eagle High) di Ketapang, Kalimantan Barat menunjukkan kebakaran meluas dan pembukaan di wilayah dalam dan di luar batas-batas konsesi.

©Greenpeace



Kalimantan,  
3 Desember 2015,  
3°3'35.28"S  
113°30'42.072"E  
Hutan gambut.  
©Ifansasti/Greenpeace



PT BNS, 3 Desember  
2015, 2°54'22"S  
110°41'1"E

Asap mengepul dari lahan gambut di perbatasan konsesi kelapa sawit PT Berkat Nabati Sejahtera (IOI Group) di Ketapang, Kalimantan Barat.

©Ifansasti/Greenpeace

# STANDAR RSPO GAGAL MELINDUNGI LANSKAP GAMBUT



Sementara standar RSPO saat ini mengakui banyak kerusakan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan terhadap gambut, mereka gagal untuk menggabungkan upaya-upaya nyata untuk mencegah kerusakan ini, menjadikan RSPO tertinggal baik dalam kemajuan di sektor swasta dan arah baru dari pemerintah Indonesia - khususnya instruksi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk semua perusahaan perkebunan untuk membendung kanal utama, untuk menghentikan semua pembangunan di lahan gambut dan untuk mengembalikan semua areal yang terbakar.<sup>71</sup>

Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO 2013 dan 'Manual praktik pengelolaan terbaik untuk budidaya kelapa sawit yang ada di lahan gambut' jelas menyatakan bahwa penurunan dan emisi CO<sub>2</sub> yang signifikan yang tak terelakkan di perkebunan kelapa di lahan gambut bahkan dalam kondisi optimal. Manual praktik terbaik mengutip studi ilmiah menunjukkan 'jejak karbon dari sekitar 60 ton CO<sub>2</sub>/ha/tahun'<sup>72</sup> dengan drainase yang optimal dari 40-60cm, dan mencatat bahwa 'pelaksanaan pengelolaan air yang baik dan BMP lainnya akan mengurangi penurunan tapi tidak akan menghentikannya'<sup>73</sup> sehingga 'dalam jangka panjang, kematian lapisan tanah gambut yang dikeringkan tidak bisa dihindari'.<sup>74</sup>

Tampaknya bahwa RSPO menerima bahwa perkebunan di lahan gambut adalah penggunaan lahan merusak jangka pendek dengan implikasi lingkungan besar, namun P&C bahkan tidak melarang penanaman kembali di lahan gambut setelah siklus perkebunan saat ini, hanya merekomendasikan penilaian drainase dan bahwa perusahaan 'harus mempertimbangkan berhenti penanaman kembali'.<sup>75</sup>

P&C mengarahkan perusahaan untuk menghindari 'penanaman ekstensif di ... tanah rapuh, termasuk gambut' dalam pengembangan baru<sup>76</sup> dengan disertai pedoman yang menyarankan ini harus tidak lebih dari 100 ha dalam suatu pengembangan.<sup>77</sup>

Dokumen juga tidak membahas kerusakan gambut dan hutan di lanskap yang lebih luas yang disebabkan oleh drainase untuk perkebunan.

Kegagalan RSPO untuk melindungi lahan gambut dalam P&C dan manual praktik terbaik berarti kemunduran upaya praktik terbaik untuk mencegah kebakaran dan degradasi.

## ALTERNATIF - KOLABORASI LINTAS SEKTOR DALAM PERLINDUNGAN GAMBUT

Pekerjaan untuk melindungi dan memulihkan lahan gambut Indonesia telah dimulai.

Pemetaan hidrologi penting untuk menilai bidang prioritas dan pekerjaan sektor swasta kini telah mengembangkan pendekatan efektif-biaya untuk pemetaan LiDAR yang dapat digunakan pada kubah utama dan gambut pesisir dalam, yang mencakup bagian terbesar dari lahan gambut Indonesia. Sistem ini telah digunakan untuk survei sekitar setengah dari lahan gambut Sumatra dan data akan tersedia bagi pemerintah Indonesia.

Pembasahan gambut kering dengan memblokir saluran drainase dapat membantu mencegah kebakaran dan mengurangi degradasi gambut. Tinjauan dari blocking kanal di masa lalu telah menunjukkan bahwa bendungan yang dibangun masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang dalam parit kecil, namun memiliki umur yang terbatas pada kanal besar di mana aliran air lebih tinggi. Alternatif baru-baru ini telah dikembangkan untuk penggunaan menurut skala, dengan menggunakan bendungan dibangun dari gambut yang dipadatkan: tes sejauh ini menunjukkan bendungan ini lebih kuat dan hemat biaya dan bisa memberikan solusi jangka panjang dalam saluran drainase primer. Ribuan bendungan tersebut sekarang telah dibangun sisi-sisi kanal di konsesi pulp di Sumatra.

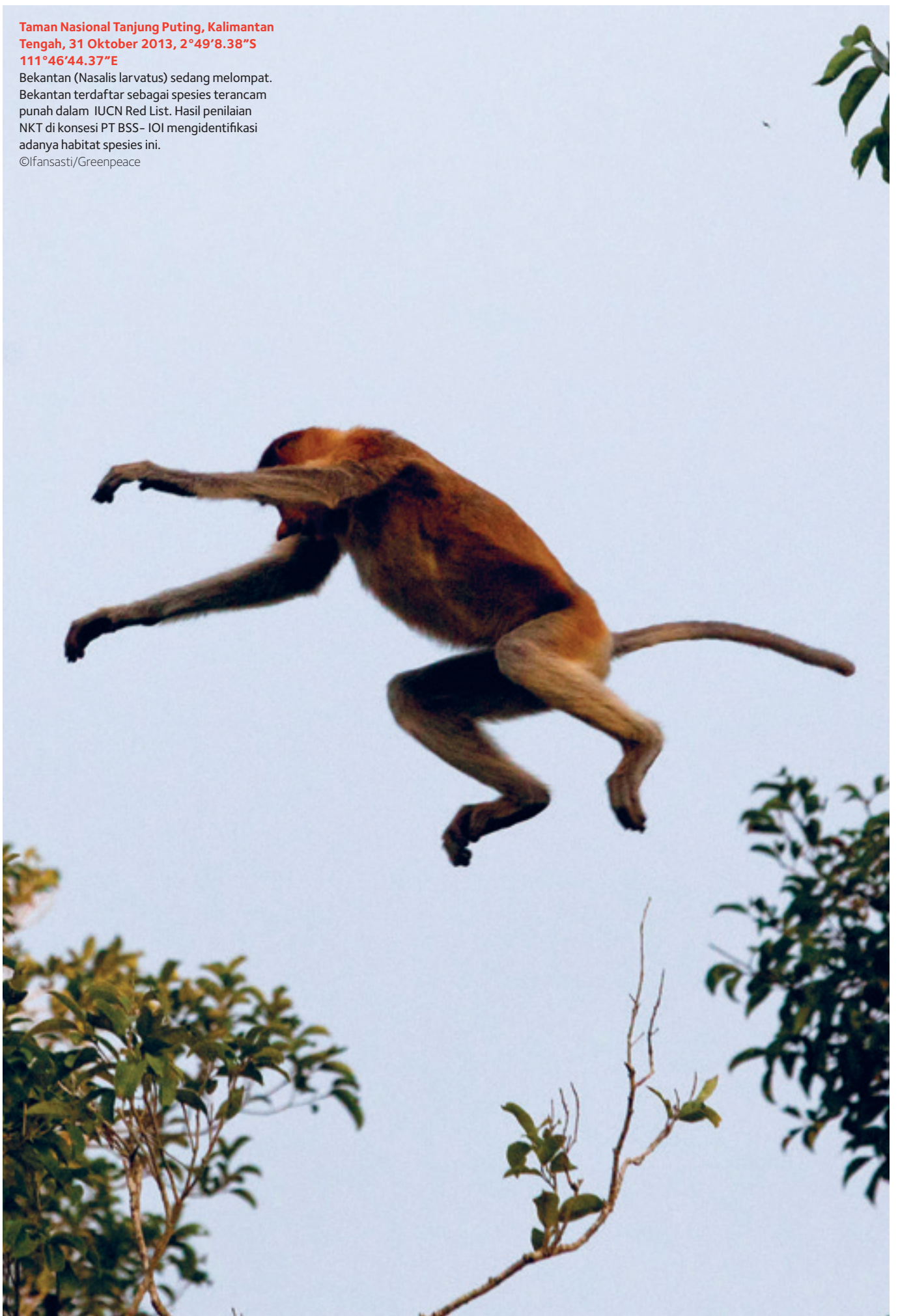
Perusahaan yang bersama menguasai 2 juta ha lahan gambut menunjukkan tanda-tanda mulai mengurangi dampaknya terhadap gambut. Lebih banyak yang perlu dilakukan termasuk kolaborasi antara aktor yang beroperasi di lanskap lahan gambut yang sama. Lanskap ini sering dipengaruhi oleh operasi perusahaan kelapa sawit.

**Penting untuk sektor perkebunan secara keseluruhan – penanam pulp, kelapa sawit dan badan-badan industri seperti RSPO - untuk mengambil tindakan.**

**Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, 31 Oktober 2013, 2°49'8.38"S 111°46'44.37"E**

Bekantan (*Nasalis larvatus*) sedang melompat. Bekantan terdaftar sebagai spesies terancam punah dalam IUCN Red List. Hasil penilaian NKT di konsesi PT BSS- IOI mengidentifikasi adanya habitat spesies ini.

©lfansasti/Greenpeace



# RENCANA 6-LANGKAH UNTUK MENYELAMATKAN LANSKAP GAMBUT

## 1. MORATORIUM

- Moratorium segera pembangunan perkebunan dan ekspansi

## 2. PEMETAAN

- Melakukan HCV dan penilaian HCS (menggunakan metodologi Pendekatan Stok Karbon Tinggi) untuk mengidentifikasi semua hutan yang tersisa dan wilayah lain yang penting secara sosial atau ekologis.
- Memetakan semua lanskap lahan gambut yang dipengaruhi oleh operasi sendiri dan para pemasok menggunakan teknologi tepat guna, termasuk LiDAR, untuk mengidentifikasi area prioritas untuk intervensi dan daerah-daerah paling berisiko dari subsidensi. Sediakan data ini untuk umum.

## 3. KOLABORASI

- Libatkan masyarakat yang tinggal dalam dan sekitar kubah gambut dan sertakan pengetahuan dan kebutuhan mereka dalam pengembangan rencana pengelolaan.
- Kemitraan multi-pihak dalam lanskap lahan gambut prioritas untuk berkolaborasi dalam perlindungan dan pengelolaan gambut.

## 4. PERLINDUNGAN

### JANGKA-PENDEK

- Penghentian segera dari daerah hutan gambut terdegradasi yang paling parah (misalnya melalui dieback) di dalam atau wilayah konsesi yang bersebelahan -
- Tingkatkan batas air di seluruh wilayah perkebunan untuk mencoba mengurangi tingkat subsidensi dan mengurangi risiko kebakaran.
- Memberlakukan zona penyangga untuk melindungi hutan gambut yang tersisa dalam dan bersebelahan dengan konsesi
- Secara permanen lindungi semua hutan yang tersisa dan wilayah konsesi yang penting secara sosial maupun ekologis.
- Syaratkan semua pemasok pihak ketiga untuk melakukan hal yang sama dan mengembangkan rencana yang berbatas waktu untuk mengurangi semua pemasok yang tidak patuh.

### JANGKA MENENGAH

- Pemerintah: Zonasi kembali wilayah lahan gambut dan revisi peraturan mengenai lahan gambut untuk melindungi hutan, menghentikan dampak drainase dan mencegah degradasi lahan gambut dan kebakaran.
- Jangka menengah – RSPO: revisi standar dan sistem pemantauan/penegakan untuk memaksa anggota untuk melindungi lanskap gambut pada dan dekat perkebunan.
- Pengembangan penggunaan lahan gambut yang tidak berbasis pengeringan termasuk spesies alternatif dan penyediaan alternatif ekonomis untuk masyarakat yang tinggal dalam lanskap lahan gambut.

## 5. RESTORASI

- Restorasi vegetasi alami dalam wilayah gambut yang paling rentan terbakar atau ditinggalkan
- Rencana berbatas waktu untuk mengurangi semua drainase yang ada yang mempengaruhi lanskap gambut pada tahun 2040 atau lebih awal.

## 6. TRANSPARANSI DAN PEMANTAUAN

- Publikasikan semua peta konsesi melalui sistem pemantauan hutan dan peringatan online Global Forest Watch.
- Syaratkan semua pemasok untuk mempublikasikan peta konsesi dari semua wilayah operasinya, dengan memprioritaskan wilayah dengan risiko tinggi sampai akhir 2016. Buat komitmen untuk menyertakan pasal transparansi dalam kontrak-kontrak baru dan mulai mengurangi produsen yang tidak patuh.
- Kolaborasikan pemantauan tutupan hutan berkelanjutan, subsidensi lahan gambut, kedalaman muka air dan emisi pada tingkat konsesi dan lanskap

# SUMBER PEMETAAN

Analisis daerah terbakar oleh Greenpeace berdasarkan citra Landsat 7 dan Landsat 8.

Peta gambut berdasarkan penggabungan:

1. **RePPProT, 1988-1990. A National Overview from the Regional Physical Planning Programme for Transmigration. (Tinjauan Nasional dari Program Perencanaan Fisik Regional untuk Transmigrasi) UK Overseas Development Administration dan Direktorat Bina Program, Departemen Transmigrasi.**
2. **Wahyunto S, S Ritung, H Subagjo (2004) (Peta Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Pulau Kalimantan, 2000-2002). Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC)**
3. **Ritung S, S Wahyunto, K Nugroho, Sukarman, Hikmatullah, Suparto, C Tafakresnanto, 2011. Peta lahan gambut Indonesia. Skala 1:250.000. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian**

Konsesi kelapa sawit 2015: analisis pemetaan Greenpeace berdasarkan peta perkebunan yang disediakan oleh Badan Planologi Kementerian Kehutanan, diunduh 29 Juli 2010 ([appgis.dephut.go.id/appgis/kml.aspx](http://appgis.dephut.go.id/appgis/kml.aspx)), ditambah dan diperbarui oleh Greenpeace dengan data yang dikumpulkan dari Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dan beberapa perusahaan perkebunan.

Konsesi hutan tanaman industri (HTI) kayu pulp 2014: Peta indikatif Kementerian Kehutanan arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani Izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, 2014. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi. <http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/1913>

Untuk kepentingan laporan ini, Greenpeace berarti Greenpeace International kecuali dikatakan berbeda.







10 September 2013  
2°49'46.23"S, 111°48'05.42"E  
Seekor laba-laba di Taman Nasional Tanjung  
Puting, Kalimantan Tengah. © Infansasti/  
Greenpeace

- 1 Ketiga peta ini adalah:  
RePPProT, 1988-1990. A National Overview from the Regional Physical Planning Programme for Transmigration. (Tinjauan Nasional dari Program Perencanaan Fisik Regional untuk Transmigrasi) UK Overseas Development Administration dan Direktorat Bina Program, Departemen Transmigrasi.  
Wahyunto, Ritung S, Subagio H, 2003. Peta Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Pulau Sumatera, 1990-2002. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC), dan publikasi serupa untuk Kalimantan dan Papua tahun 2004 dan 2006, secara kolektif diacu sebagai Atlas Gambut Wetlands International.  
Ritung S, Wahyunto, Nugroho K, Sukarman, Hikmatullah, Suparto, Tafakresnanto C, 2011. Peta lahan gambut Indonesia. Skala 1:250.000. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.  
Dua peta terakhir diproduksi dengan kewenangan Kementerian Pertanian. Peta tahun 2011 sebagian besar diturunkan dari Atlas Gambut 2003-2006 dengan beberapa kesalahan yang diperbaiki tapi jelas tidak menyertakan banyak gambut tipis dan tidak membedakan antara gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Lihat diskusi lebih lanjut dalam bagian 2 dari: BAPPENAS, Ditjen Sumber Daya Air, Partners for Water Programme (2013) Quick Assessment and Nationwide Screening (QANS) of peat and lowland resources and action planning for the implementation of a national lowland strategy. (Penilaian cepat dan Penyaringan nasional (QANS) gambut dan sumber daya dataran rendah dan rencana aksi untuk pelaksanaan strategi dataran rendah nasional.) Peta lahan gambut Indonesia, Laporan QANS Component, 4 Februari 2013. <https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/03/QANS-Peat-mapping-report-final-with-cover.pdf>.
- 2 Menurut peraturan yang memberi mandat Satu Peta, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
- 3 IOI Group (2014) RSP0 summary report of SEIA and HCV assessments – PT Bumi Sawit Sejahtera (Laporan ringkasan RSP0 mengenai penilaian SEIA dan HCV – PT Bumi Sawit Sejahtera) hal 17 [http://www.rspo.org/file/RSP0-Summary%20Report%20of%20HCV-SIA%20Assessments\\_PT%20BSS.pdf](http://www.rspo.org/file/RSP0-Summary%20Report%20of%20HCV-SIA%20Assessments_PT%20BSS.pdf)
- 4 Analisis pemetaan Greenpeace 2016
- 5 Analisis pemetaan Greenpeace 2016. 64.000ha dari 214.000ha berdasarkan analisis Landsat 7 dan Landsat 8.
- 6 Hal ini telah diperkirakan dalam kajian di tempat lain di Pulau Kalimantan dan Sumatra. Lihat: Deltares (2015) . (Lahan gambut yang dikeringkan di Sarawak, Malaysia akan makin tergenang karena subsidensi.) [https://www.deltares.nl/en/news/drained-peatlands-in-sarawak-malaysia-will-be-increasingly-flooded-due-to-subsidence-and-Deltares-\(2015\)](https://www.deltares.nl/en/news/drained-peatlands-in-sarawak-malaysia-will-be-increasingly-flooded-due-to-subsidence-and-Deltares-(2015)) . (Penilaian dampak drainase perkebunan di Semenanjung Kampar, Riau) <https://www.deltares.nl/en/projects/impact-assessments-for-pulp-and-oil-palm-plantations-in-the-kampar-peninsula-peatlands-riau-indonesia/>
- 7 PT Mayangkara Tanaman Industri adalah pemasok APRIL (walaupun bukan dari konsesi di Ketapang) dan PT Buana Megafama Jaya sedang dinilai sebagai mitra pasokan APP. Sumber: komunikasi langsung.
- 8 Sekitar 49.000 dari 153.000 hektar. Analisis pemetaan Greenpeace 2016.
- 9 Untuk tujuan laporan ini, lanskap gambut Ketapang didefinisikan sebagai daerah gambut yang hampir utuh yang terletak di selatan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, seluas sekitar 214.000 hektar. Peta gambut yang digunakan di sini adalah kombinasi peta-peta gambut yang ada – lihat box 'Apakah lanskap gambut Ketapang?'
- 10 Situs web IOI Group, 'Group structure' [http://www.ioigroup.com/Content/CI/Corp\\_Structure](http://www.ioigroup.com/Content/CI/Corp_Structure)
- 11 Situs web IOI Group, 'Group structure' [http://www.ioigroup.com/Content/CI/Corp\\_Structure](http://www.ioigroup.com/Content/CI/Corp_Structure)
- 12 IOI Group (2015) Laporan Tahunan 2015 hal 249 [http://www.ioigroup.com/Content/IR/PDF/AnnualReport/Corp/2015\\_AR.pdf](http://www.ioigroup.com/Content/IR/PDF/AnnualReport/Corp/2015_AR.pdf)
- 13 IOI Group (2015) Laporan Tahunan 2015 hal 249 [http://www.ioigroup.com/Content/IR/PDF/AnnualReport/Corp/2015\\_AR.pdf](http://www.ioigroup.com/Content/IR/PDF/AnnualReport/Corp/2015_AR.pdf) dan Bumitama Agri Ltd (2015) Laporan Tahunan 2015 hal 103 <http://ir.bumitama-agri.com/annuals.cfm>
- 14 IOI Group (2015) Laporan Tahunan 2015 hal 254 [http://www.ioigroup.com/Content/IR/PDF/AnnualReport/Corp/2015\\_AR.pdf](http://www.ioigroup.com/Content/IR/PDF/AnnualReport/Corp/2015_AR.pdf)
- 15 IOI (2016) IOI Group – Update on Sustainability (Kabar mengenai Keberlanjutan), April 17, 2016 <http://www.ioigroup.com/Content/NEWS/NewsroomDetails?intNewsID=781>
- 16 Situs Web IOI Loders Croklaan <http://europe.ioiloders.com/>
- 17 Situs Web IOI Oleochemicals: Company <http://www.ioioleo.com/company-oleochemical-e.html> diakses 2 Juni 2016
- 18 IOI Group (2015) Laporan Tahunan 2015 hal 43 [http://www.ioigroup.com/Content/IR/PDF/AnnualReport/Corp/2015\\_AR.pdf](http://www.ioigroup.com/Content/IR/PDF/AnnualReport/Corp/2015_AR.pdf)
- 19 Greenpeace International (2008) 'Burning Borneo' halaman 14, 21-25 (Baca juga versi bahasa Indonesia 'Membakar Kalimantan': <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/membakar-kalimantan/> )
- 20 RSP0 (2012) Letter from RSP0 to IOI and complainants (Surat dari RSP0 kepada IOI dan para penggugat), 3 Mei 2012 [www.rspo.org/file/RSP0 letter to IOI LTK sNGO 20120503.pdf](http://www.rspo.org/file/RSP0%20letter%20to%20IOI%20LTK%2020120503.pdf)
- 21 Situs web RSP0, 'Case Tracker: IOI - IOI Pelita Sdn Bhd' <http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/4> diakses: 2 Juni 2016
- 22 Diterima pada tanggal 3 April 2015, lihat RSP0 website 'Case tracker' <http://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/80>
- 23 RSP0 (2016) Notice to RSP0 Members on the Suspension of IOI Group's certification (Nota kepada anggota RSP0 mengenai diskorsnya sertifikasi IOI Group), 1 April 2016 <http://www.rspo.org/news-and-events/announcements/notice-to-rspo-members-on-the-suspension-of-ioi-groups-certification>
- 24 RSP0 (2016) Suspension of IOI Group's Certification (Diskorsnya Sertifikasi IOI Group) 31 March 2016 <http://www.rspo.org/files/download/29e69420862ab64>
- 25 Burrows, D (2016) Major brands dump palm oil supplier IOI following RSP0 suspension (Merek-merek besar memutuskan hubungan dengan pemasok minyak kelapa sawit IOI setelah penangguhan RSP0) 7 April 2016 <http://www.foodnavigator.com/Market-Trends/Major-brands-dump-palm-oil-supplier-IOI-following-RSP0-suspension>
- 26 GM (2016) General Mills statement on palm oil supplier (Pernyataan General Mills mengenai pemasok minyak kelapa sawit), Siaran Pers, 3 Juni, 2016 <http://www.generalmills.com/en/News/NewsReleases/Library/2016/June/palm-oil-statement63/278f1194-f8f7-448a-bcf9-bbb09cf9ae997>
- 27 Vaughan, A (2016) Top palm oil producer sues green group over deforestation allegations (Produsen minyak kelapa sawit besar menggugat kelompok lingkungan karena tuduhan deforestasi) 9 Mei 2016 <http://www.theguardian.com/environment/2016/may/09/top-palm-oil-producer-sues-green-group-over-deforestation-allegations>
- 28 IOI (2016) IOI withdraws legal challenge against RSP0 Board's decision 6 June 2016 (IOI menarik gugatan hukum terhadap keputusan dewan RSP0 tanggal 6 Juni 2016) <http://www.ioigroup.com/Content/NEWS/NewsroomDetails?intNewsID=804>
- 29 Jacobson, P (2016) Indonesia's forestry ministry follows through on palm oil permit freeze (Kementerian Kehutanan Indonesia menindaklanjuti pembekuan izin kelapa sawit)
- 23 Mei 2016 <https://news.mongabay.com/2016/05/indonesias-forestry-ministry-follows-palm-oil-permit-freeze/>
- 30 Instruksi Menteri LHK S.494/MENLHK-PHPL/2015 dan S661/MENLHK-SETJEN/ROKUM/2015
- 31 Deltares (2016) Exploration of efficient and cost-effective use of LiDAR data in lowland/peatland landscape mapping and management in Indonesia (Mengekplorasi cara guna LiDAR yang efisien dan efektif pada pemetaan lanskap dan pengelolaan dataran rendah/lahan gambut di Indonesia) <https://www.deltares.nl/en/projects/lidar-data-large-scale-peatland-management-flood-risk-assessment/>
- 32 Deltares (2016) Brief guideline for plantation perimeter canal blocking as a rapid fire risk reduction measure in Indonesian peatlands (Pedoman singkat penutupan kanal lingkaran luar sebagai tindakan penurunan risiko kebakaran pada lahan gambut Indonesia)
- 33 Situs web IOI Group 'Environment sustainability - Corporate responsibility - plantation'
- 34 IOI Group (2014) Ringkasan laporan RSP0 mengenai penilaian SEIA dan HCV – PT Bumi Sawit Sejahtera hal 3 [http://www.rspo.org/file/RSP0-Summary%20Report%20of%20HCV-SIA%20Assessments\\_PT%20BSS.pdf](http://www.rspo.org/file/RSP0-Summary%20Report%20of%20HCV-SIA%20Assessments_PT%20BSS.pdf)
- 35 IOI Group (2014) Ringkasan laporan RSP0 mengenai penilaian SEIA dan HCV – PT Bumi Sawit Sejahtera hal 17 [http://www.rspo.org/file/RSP0-Summary%20Report%20of%20HCV-SIA%20Assessments\\_PT%20BSS.pdf](http://www.rspo.org/file/RSP0-Summary%20Report%20of%20HCV-SIA%20Assessments_PT%20BSS.pdf)
- 36 IOI Group (2014) Ringkasan laporan RSP0 mengenai penilaian SEIA dan HCV – PT Bumi Sawit Sejahtera hal 4 [http://www.rspo.org/file/RSP0-Summary%20Report%20of%20HCV-SIA%20Assessments\\_PT%20BSS.pdf](http://www.rspo.org/file/RSP0-Summary%20Report%20of%20HCV-SIA%20Assessments_PT%20BSS.pdf)

- 37 Baik Keputusan Presiden No 32/1990 <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4e944f2251dd3/parent/21942> maupun Peraturan Pemerintah 26/2008 menyatakan bahwa gambut dengan kedalaman >3m harus secara otomatis dinyatakan sebagai wilayah lindung. Peraturan Menteri Pertanian No14/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit menyatakan bahwa lahan gambut dapat digunakan untuk perkebunan kelapa sawit bila ketebalannya <3m. Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 376/1998 yang memberikan kriteria untuk pemilihan wilayah untuk perkebunan kelapa sawit dan menyatakan bahwa 'pembangunan perkebunan pada lahan gambut lebih dari dua meter tidak dibenarkan' Pedoman mengenai pengembangan lahan gambut sangat jelas tidak tampak dalam Undang-Undang No 39/2014 tentang Perkebunan. Peraturan Pemerintah No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, (saat ini dalam revisi), memperbolehkan zonasi lahan gambut untuk perlindungan dan budidaya; di mana lahan gambut dengan ketebalan >3m yang belum dialokasikan dalam konsesi harus diperuntukkan bagi daerah lindung.
- 38 IOI Group (2014) RSP0 summary report of SEIA and HCV assessments – PT Bumi Sawit Sejahtera (Ringkasan laporan RSP0 mengenai penilaian SEIA dan HCV– PT Bumi Sawit Sejahtera) hal 6 [http://www.rspo.org/file/RSP0-Summary%20Report%20of%20HCV-SIA%20Assessments\\_PT%20BSS.pdf](http://www.rspo.org/file/RSP0-Summary%20Report%20of%20HCV-SIA%20Assessments_PT%20BSS.pdf)
- 39 Aksenta (2014) Peta HCV, AGB>40tonC/ha dan gambut
- 40 IOI website 'Sustainable palm oil manifesto' (Manifesto)
- 41 IOI Group (2014) RSP0 Notification of ongoing planting (Notifikasi RSP0 mengenai berlanjutnya penanaman) 27 Februari 2014, hal 24 menunjukkan scan rencana restorasi. [http://www.rspo.org/file/Notification\\_ongoing%20NPP\\_PT%20BSS.pdf](http://www.rspo.org/file/Notification_ongoing%20NPP_PT%20BSS.pdf)
- 42 IOI Group (2014) RSP0 Notification of ongoing [sic] planting (Notifikasi RSP0 mengenai Berlanjutnya Penanaman) 27 Februari 2014 [http://www.rspo.org/file/Notification\\_ongoing%20NPP\\_PT%20BSS.pdf](http://www.rspo.org/file/Notification_ongoing%20NPP_PT%20BSS.pdf)
- 43 Surat kepada Greenpeace Asia Tenggara dari CEO IOI Dato Lee, 26 Agustus 2014
- 44 IOI Loders Crocklaan (2014) Sustainable palm oil policy (Kebijakan minyak sawit keberlanjutan) hal 4 [http://europe.ioiloders.com/images/static\\_pages/150108\\_Brochure\\_Sustainable\\_Palm\\_Oil\\_Policy.pdf](http://europe.ioiloders.com/images/static_pages/150108_Brochure_Sustainable_Palm_Oil_Policy.pdf)
- 45 IOI (2014) Sustainability policy statement revised 15 December 2014 <http://www.ioigroup.com/Content/S/PDF/IOI%20Sustainability%20Policy%20Statement.pdf>
- 46 NASA (2015) Fire Information for Resource Management System (FIRMS) (Informasi Kebakaran untuk Sistem Manajemen Sumberdaya). <https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/firms>.
- 47 Aksenta (2015) Talking sustainability: Seeking the truth (Bicara keberlanjutan: Mencari kebenaran) halaman 4: Areal GIS estimasi pada citra satelit yang ditumpangkan pada Landsat 18 November 2014 dan blok penanaman peta PT. BSS, mengungkapkan bahwa kebakaran lahan yang parah pada periode Agustus-November 2014 telah membakar hampir semua wilayah sebelah barat dari kanal PT. HSL yang melintasi wilayah izin PT. BSS (berlokasi di rencana 'penanaman blok 2015'), meliputi semua total area sekitar 1,808 hektar. Selain itu, sebuah kebakaran signifikan berdampak pada wilayah sebelah timur dari kanal PT. HSL meliputi sekitar 3,109 hektar dari wilayah yang belum dibuka, dan area dengan total sekitar 663 hektar yang baru dibuka di blok penanaman tahun 2014.' <http://www.rspo.org/files/download/a978f9c551ee78d>
- 48 Aksenta (2015) Talking sustainability: Seeking the truth (Bicara keberlanjutan: Mencari kebenaran) halaman 21 <http://www.rspo.org/files/download/a978f9c551ee78d>
- 49 1,695 hektar terbakar. Analisis pemetaan Greenpeace (2016) berdasarkan gambar Landsat 7 dan Landsat 8.
- 50 IOI Corporation and IOI Loders Crocklaan (2015) Statement of mutual responsibility between IOI Corporation and IOI Loders Crocklaan (Pernyataan tanggungjawab bersama antara IOI Corporation dan IOI Loders Crockland), 12 Januari 2015. [http://northamerica.ioiloders.com/images/applications/Mutual\\_responsibility\\_agreement\\_Jan\\_2015.pdf](http://northamerica.ioiloders.com/images/applications/Mutual_responsibility_agreement_Jan_2015.pdf)
- 51 KLHK (2015) Perkembangan Penanganan Penegakan Hukum Kebakaran Lahan dan Hutan [www.menlhk.go.id/berita-16-perkembangan-penanganan-penegakan-hukum-kebakaran-lahan-dan-hutan.html](http://www.menlhk.go.id/berita-16-perkembangan-penanganan-penegakan-hukum-kebakaran-lahan-dan-hutan.html)
- 52 Instruksi Menteri LHK S.494/MENLHK-PHPL/2015 dan S661/MENLHK-SETJEN/ROKUM/2015
- 53 Satu contoh ditanami dalam sebuah pembangunan blok di sekitar koordinat: 2°55'13.462"S/110°43'41.981"E
- 54 Aksenta (2014) Map of HCV, AGB>40tonC/ha and peat (Peta HCV, AGB>40tonC/ha dan gambut)
- 55 Daemeter (2016) Tinjauan Laporan HCV untuk PT. Bumi Sawit Sejahtera 18 April 2016
- 56 Penekanan dari sumber asli. IOI (2016) Update on Sustainability (Pembaruan mengenai Keberlanjutan) 2 Juni 2016 [www.ioigroup.com/Content/NEWS/NewsroomDetails?intNewsID=801](http://www.ioigroup.com/Content/NEWS/NewsroomDetails?intNewsID=801)
- 57 Lihat atas untuk keterangan lebih lanjut. Peraturan mencakup Keputusan Presiden 32/1990, Peraturan Menteri 26/2008, Peraturan Menteri Pertanian 14/2009
- 58 RSP0 (2013) Prinsip dan Kriteria, Prinsip 2 <http://www.rspo.org/resources/key-documents/certification/rspo-principles-and-criteria>
- 59 RSP0 (2013) 'Prinsip dan Kriteria, kriteria 7.4 'Ekstensif' didefinisikan sebagai lebih dari 100 hektar. <http://www.rspo.org/resources/key-documents/certification/rspo-principles-and-criteria>
- 60 Aksenta (2015) Talking sustainability: Seeking the truth (Bicara keberlanjutan: mencari kebenaran) hal 20-21 <http://www.rspo.org/files/download/a978f9c551ee78d>
- 61 IOI Group (2014) RSP0 Notification of ongoing planting (Notifikasi RSP0 mengenai berlanjutnya penanaman) 27 Februari 2014, hal 24 menunjukkan scan rencana restorasi. [http://www.rspo.org/file/Notification\\_ongoing%20NPP\\_PT%20BSS.pdf](http://www.rspo.org/file/Notification_ongoing%20NPP_PT%20BSS.pdf)
- 62 IOI Group (2014) RSP0 Notification of ongoing planting (Notifikasi RSP0 mengenai berlanjutnya penanaman) 27 Februari 2014, hal 19
- 63 Lihat Aksenta (2015) Talking sustainability: Seeking the truth (Bicara keberlanjutan: mencari kebenaran) hal 4 <http://www.rspo.org/files/download/a978f9c551ee78d>
- 64 Bagian dari blok pembangunan di sekitar koordinat 2°49'3.14"S / 110°54'33.92"
- 65 Email dari Dr. Surina Ismail, IOI Group Head of Sustainability, kepada Greenpeace, diterima 27 Mei 2016.
- 66 Sebagai contoh, melemahnya perlindungan hutan: pernyataan ini menjauh dari komitmen IOI Loders Crocklaan terhadap Pendekatan Stok Karbon Tinggi ke konvergensi HCS yang lebih lemah.
- 67 Reason et al (2015) HCS+ Draft extended summary (HCS+ Draft ringkasan diperpanjang ) <http://www.carbonstockstudy.com/draft-synthesis-report>
- 68 HCS Approach Steering Group (2015) The HCS Approach toolkit version 1.0 (Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi, versi 1.0) hal 7 <http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/>
- 69 IOI (2016) IOI withdraws legal challenge against RSP0 Board's decision (IOI mencabut tuntutan terhadap Keputusan Board RSP0) tanggal 6 Juni 2016 <http://www.ioigroup.com/Content/NEWS/NewsroomDetails?intNewsID=804>
- 70 RSP0 (2015) RSP0 Next Content <http://www.rspo.org/certification/rspo-next>
- 71 Instruksi Menteri LHK S.494/MENLHK-PHPL/2015 dan S661/MENLHK-SETJEN/ROKUM/2015 [http://eyesontheforest.or.id/attach/Minister\\_of\\_E\\_and\\_F\\_Instruction\\_number\\_S.661\\_2015.pdf](http://eyesontheforest.or.id/attach/Minister_of_E_and_F_Instruction_number_S.661_2015.pdf)
- 72 RSP0 (2013) 'Summary: RSP0 manual on best management practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat' (Ringkasan: Manual RSP0 mengenai praktik manajemen terbaik (BMP) untuk budidaya kelapa sawit di lahan gambut) halaman 7 <http://www.rspo.org/resources/supplementary-materials#>
- 73 RSP0 (2013) 'Summary: RSP0 manual on best management practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat' (Ringkasan: Manual RSP0 mengenai praktik manajemen terbaik (BMP) untuk budidaya kelapa sawit di lahan gambut) halaman 10 <http://www.rspo.org/resources/supplementary-materials#>
- 74 RSP0 (2013) 'Summary: RSP0 manual on best management practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat' (Ringkasan: Manual RSP0 mengenai praktik manajemen terbaik (BMP) untuk budidaya kelapa sawit di lahan gambut) halaman 8 <http://www.rspo.org/resources/supplementary-materials#>
- 75 RSP0 (2013) 'Prinsip dan Kriteria', kriteria 4.3.5 dan pedoman penjelasannya <http://www.rspo.org/resources/key-documents/certification/rspo-principles-and-criteria>
- 76 RSP0 (2013) 'Prinsip dan Kriteria', kriteria 7.4 <http://www.rspo.org/resources/key-documents/certification/rspo-principles-and-criteria>
- 77 RSP0 (2013) 'Prinsip dan Kriteria', hal 70 <http://www.rspo.org/resources/key-documents/certification/rspo-principles-and-criteria>



**GREENPEACE**

Juni 2016

Diterbitkan oleh Greenpeace International  
Ottho Heldringstraat 5  
1066 AZ Amsterdam  
The Netherlands

[enquiries@greenpeace.org](mailto:enquiries@greenpeace.org)  
[www.greenpeace.org/burningissue](http://www.greenpeace.org/burningissue)

---

Cover depan:

PT BSS, 16 April 2016,  
2°55'13.4"S 110°43'40.2"E

Seorang investigator Greenpeace mendokumentasikan kehancuran di kawasan gambut di konsesi kelapa sawit PT. BSS (IOI) yang diidentifikasi perusahaan sebagai wilayah 'terlarang' untuk pengembangan. Kawasan ini mengalami kebakaran hebat pada tahun 2015.

©Ifansasti/Greenpeace

Sampul belakang:

Kalimantan Barat, 21 September 2015,  
1°52'44.191"S 110°7'33.359"E

Sebatang kayu membara di lahan gambut di antara konsesi kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Wilayah ini termasuk dalam wilayah moratorium pemerintah tentang izin baru untuk pengembangan pada hutan primer atau lahan gambut. ©Ifansasti/Greenpeace

©Ifansasti/Greenpeace